



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

**PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA NOMOR 33 TAHUN 2023
TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024**

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2023**





SALINAN

BUPATI LIMA PULUH KOTA
PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
NOMOR 33 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LIMA PULUH KOTA,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 142 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 10);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15);
9. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023 Nomor 15).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2024.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lima Puluh Kota.
4. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
5. Pembangunan adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024, program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi.
8. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah rencana kerja Perangkat Daerah di lingkup Pemerintahan Kabupaten Lima Puluh Kota.
10. Kebijakan Umum Anggaran yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada PD untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran PD.
12. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
13. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah.
14. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.

Pasal 2

Maksud penyusunan Renja PD adalah untuk :

- a. menjabarkan Program, kegiatan, dan sub kegiatan sebagaimana tercantum dalam RKPD Tahun 2024 sesuai dengan urusan dan kewenangan masing-masing PD; dan
- b. menyediakan suatu acuan dan pedoman pelaksanaan Program, kegiatan, dan sub kegiatan masing-masing PD untuk tahun 2024.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Renja PD adalah untuk :

- a. memudahkan seluruh jajaran pimpinan dan staf PD dalam melaksanakan Program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2024;
- b. menjadi pedoman dalam pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan kewenangan dan tupoksi pada masing-masing PD; dan
- c. menjadi salah satu acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) PD tahun 2024.

Pasal 4

(1) Renja PD disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- a. bab I memuat pendahuluan;
- b. bab II memuat hasil evaluasi Renja PD tahun lalu;
- c. bab III memuat tujuan, sasaran, Program dan kegiatan;
- d. bab IV memuat rencana kerja dan pendanaan PD; dan
- e. bab V memuat penutup.

(2) Renja PD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud ayat (1), dengan rincian sebagai berikut:

1. Rencana Kerja Sekretariat Daerah;
2. Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
3. Rencana Kerja Inspektorat;
4. Rencana Kerja Dinas Kesehatan;
5. Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
6. Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
7. Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
8. Rencana Kerja Dinas Pemadam Kebakaran;
9. Rencana Kerja Dinas Sosial;
10. Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
11. Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
12. Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

13. Rencana Kerja Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah;
 14. Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;
 15. Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika;
 16. Rencana Kerja Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga;
 17. Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari;
 18. Rencana Kerja Dinas Perhubungan;
 19. Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman;
 20. Rencana Kerja Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan;
 21. Rencana Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
 22. Rencana Kerja Dinas Perikanan;
 23. Rencana Kerja Dinas Pangan;
 24. Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
 25. Rencana Kerja Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan;
 26. Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 27. Rencana Kerja Badan Keuangan;
 28. Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 29. Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 30. Rencana Kerja Kecamatan Gunuang Omeh;
 31. Rencana Kerja Kecamatan Bukik Barisan;
 32. Rencana Kerja Kecamatan Suliki;
 33. Rencana Kerja Kecamatan Guguk;
 34. Rencana Kerja Kecamatan Mungka;
 35. Rencana Kerja Kecamatan Akabiluru;
 36. Rencana Kerja Kecamatan Payakumbuh;
 37. Rencana Kerja Kecamatan Luak;
 38. Rencana Kerja Kecamatan Lareh Sago Halaban;
 39. Rencana Kerja Kecamatan Situjuh Limo Nagari;
 40. Rencana Kerja Kecamatan Harau;
 41. Rencana Kerja Kecamatan Pangkalan Koto Baru;
 42. Rencana Kerja Kecamatan Kapur IX.
- (3) Renja PD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud ayat (2), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Kepala PD menyusun Renja PD Tahun 2024 dengan berpedoman kepada RKPD Tahun 2024 dan Rencana Strategis PD.
- (2) Renja PD sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan penjabaran dari RKPD.

Pasal 6

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja PD dilakukan oleh masing-masing Kepala PD.

Pasal 7

Perubahan Renja PD Tahun 2024 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Ditetapkan di Sarilamak
pada tanggal 14 Desember 2023

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

ttd

SAFARUDDIN DT. BANDARO RAJO

Diundangkan di Sarilamak
pada tanggal 14 Desember 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,

ttd

HERMAN AZMAR
BERITA DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN 2023 NOMOR 33

salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. LIMA PULUH KOTA


ERI FORTUNA, SH
NIP.19660104199303 1 006

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
NOMOR : 33 TAHUN 2023
TANGGAL : 14 DESEMBER 2023
TENTANG : RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

1. Rencana Kerja Sekretariat Daerah;
2. Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
3. Rencana Kerja Inspektorat;
4. Rencana Kerja Dinas Kesehatan;
5. Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
6. Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
7. Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
8. Rencana Kerja Dinas Pemadam Kebakaran;
9. Rencana Kerja Dinas Sosial;
10. Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
11. Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
12. Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
13. Rencana Kerja Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah;
14. Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;
15. Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika;
16. Rencana Kerja Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga;
17. Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari;
18. Rencana Kerja Dinas Perhubungan;
19. Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman;
20. Rencana Kerja Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan;
21. Rencana Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
22. Rencana Kerja Dinas Perikanan;
23. Rencana Kerja Dinas Pangan;
24. Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
25. Rencana Kerja Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan;
26. Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
27. Rencana Kerja Badan Keuangan;
28. Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
29. Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
30. Rencana Kerja Kecamatan Gunuang Omeh;
31. Rencana Kerja Kecamatan Bukik Barisan;
32. Rencana Kerja Kecamatan Suliki;
33. Rencana Kerja Kecamatan Guguaq;
34. Rencana Kerja Kecamatan Mungka;
35. Rencana Kerja Kecamatan Akabiluru;
36. Rencana Kerja Kecamatan Payakumbuh;
37. Rencana Kerja Kecamatan Luak;
38. Rencana Kerja Kecamatan Lareh Sago Halaban;
39. Rencana Kerja Kecamatan Situjuah Limo Nagari;
40. Rencana Kerja Kecamatan Harau;
41. Rencana Kerja Kecamatan Pangkalan Koto Baru;
42. Rencana Kerja Kecamatan Kapur IX.



**PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

**11. RENCANA KERJA DINAS
PENGENDALIAN PENDUDUK
KELUARGA BERENCANA
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK TAHUN 2024**

DAFTAR ISI

Daftar Isi	i
BAB I : PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	
1.2. Landasan Hukum.....	
1.3. Maksud dan Tujuan	
1.4. Sistematika Penulisan	
BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PPKBPPPA	
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas PPKBPPPA Tahun Lalu dan Capaian Renstra DPPKBPPPA	
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan DPPKBPPPA	
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DPPKBPPPA	
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Lima Puluh Kota	
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja DPPKBPPPA	
BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	

DAFTAR TABEL

- Tabel 2.1 : Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja DPPKBPPPA dan Pencapaian Renstra DPPKBPPPA s/d Tahun 2022
- Tabel 2.2 : Pencapaian Kinerja Pelayanan DPPKBPPPA Kabupaten Lima Puluh Kota
- Tabel 2.3 : Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun
- Tabel 2.4 : Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun
- Tabel 3.1 : Program dan Kegiatan yang Ada Pada Setiap Perangkat Daerah
- Tabel 3.2 : Program dan Kegiatan Lingkup Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- Tabel 3.3 : Program dan Kegiatan Lingkup Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- Tabel 3.4 : Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD. Hal ini sebagaimana yang diamanatkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Penyusunan Renja tahun 2024 harus menjadi bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 – 2026, sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 – 2026, yang kemudian dijabarkan dalam Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Dalam melakukan penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana,

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBPPPA) Kabupaten Lima Puluh Kota melakukan koordinasi dengan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (Bapelitbang) Kabupaten Lima Puluh Kota dan pemangku kepentingan. Selanjutnya sesuai dengan pasal 16 ayat 2, proses penyusunan Renja melalui tahapan sebagai berikut: (i) persiapan penyusunan; (ii) penyusunan rancangan awal; (iii) penyusunan rancangan; (iv) pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah; (v) perumusan rancangan akhir dan (vi) penetapan. Seluruh tahapan ini dimulai pada bulan Desember 2022, dan akan selesai pada bulan Juli 2023.

Tahap persiapan penyusunan Renja meliputi: penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah, orientasi mengenai Renja Perangkat Daerah, penyusunan agenda kerja tim penyusun Renja Perangkat Daerah, penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berdasarkan SIPD. Tim Penyusun Renja Perangkat Daerah berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 905/333/BUP-LK/XII/2022 Tentang Pembentukan Struktur Organisasi Tim Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022.

Selanjutnya tahap penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah. Rancangan awal Renja DPPKBPPPA Tahun 2024 berpedoman pada Renstra DPPKBPPPA Tahun 2021-2026, hasil evaluasi Renja DPPKBPPPA Tahun 2022 (n-2) dan perkiraan capaian Tahun 2023 (n-1). Sesuai dengan pasal 126 penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah dilaksanakan paling lambat minggu pertama Bulan Desember. Sehingga untuk rancangan awal Renja DPPKBPPPA Tahun 2024, direncanakan selesai minggu pertama bulan Desember 2022. Penyusunan Renja ini berpedoman pada Renstra dengan tujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran dan prakiraan maju yang disusun dalam rancangan awal Renja dengan Renstra

Perangkat Daerah. Sedangkan evaluasi Renja tahun lalu dan tahun berjalan bertujuan untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternative dan atau kegiatan baru yang disusun dalam rancangan awal Renja dapat mengoptimalkan pencapaian sasaran Rencana Perangkat Daerah. Sehingga rancangan awal Renja ini mencakup analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah dan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu. Pedoman untuk penyusunan Rancangan Awal ini adalah Surat Edaran Bupati Lima Puluh Kota Nomor 050/27/SE/BAPELITBANG-LK/II/2023 Tentang Pedoman Penyempurnaan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2024 serta menyesuaikan dengan perkembangan penyusunan RKPD Tahun 2024. Tahap penyusunan Rancangan Renja sebagaimana Tabel 1.1 berikut ini :

No	Jenis / Tahapan Kegiatan	2022				2023				2024																											
		Des				Jan				Feb				Maret				April				Mei				Juni				Juli							
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
2	Penyempurnaan ranwal berdasarkan surat edaran kepala daerah tentang Pedoman Penyempurnaan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah																																				
C	Penyusunan Rancangan Renja 2024																																				
1	Penyusunan Rancangan Renja PD																																				
2	Penyampaian Rancangan Renja PD kepada Bapelitbang untuk diverifikasi sebagai bahan penyempurnaan ranwal RKPD menjadi rancangan RKPD																																				
3	Verifikasi Renja PD oleh Bapelitbang untuk menjamin bahwa rancangan renja PD sudah selaras dengan Rancangan Awal RKPD																																				
4	Penyempurnaan Rancangan Renja dengan mempedomani hasil verifikasi																																				
D	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas PD																																				
1	Pelaksanaan Forum PD DPPKBPPPA yang dihadiri oleh pemangku kepentingan yang memiliki keterkaitan dengan tugas dan fungsi DPPKBPPPA bertujuan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam rancangan																																				

Tahap ketiga dalam penyusunan Renja DPPKBPPPA Tahun 2024 adalah tahap penyusunan rancangan. Penyusunan rancangan merupakan proses penyempurnaan rancangan awal Renja Perangkat Daerah. Rancangan Renja ini kemudian dibahas dan disempurnakan dalam forum perangkat Daerah/lintas perangkat Daerah. Rancangan Renja ini kemudian disampaikan ke Bapelitbang untuk diverifikasi oleh tim dan dijadikan sebagai bahan penyempurnaan rancangan awal RKPD menjadi rancangan RKPD. Rancangan Renja ini disampaikan ke Bapelitbang paling lambat minggu ketiga bulan Maret 2023.

Tahap berikutnya adalah pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah. Sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 pasal 136 ayat 1, dijelaskan bahwa Forum Perangkat Daerah dilaksanakan oleh masing-masing Perangkat Daerah berkoordinasi dengan Bapelitbang. Forum Perangkat Daerah Dinas PPKBPPPA dilaksanakan pada tanggal 28 Februari 2023 di Aula Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yang dihadiri oleh pemangku kepentingan yang terkait dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah. Tujuan dari pembahasan ini adalah untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Rancangan Renja Perangkat Daerah. Hasil pembahasan rancangan Renja Perangkat Daerah dalam Forum Perangkat Daerah/ Lintas Perangkat Daerah dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh unsur yang mewakili pemangku kepentingan yang menghadiri forum Gabungan Perangkat Daerah/ Lintas Perangkat Daerah.

Perumusan rancangan akhir merupakan tahap selanjutnya dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah. Rancangan akhir Renja merupakan proses penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah menjadi Rancangan akhir Renja Perangkat Daerah

berdasarkan Perkada tentang RKPD. Perumusan Rancangan akhir Renja Perangkat Daerah dilakukan untuk mempertajam program, kegiatan dan pagu indikatif Perangkat Daerah berdasarkan program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam Perkada tentang RKPD. Sistematika penyajian rancangan akhir Renja sama dengan rancangan awal Renja.

Tahap akhir dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah adalah tahap penetapan. Rancangan akhir Renja DPPKBPPPA Tahun 2024 disampaikan ke Bapelitbang untuk diverifikasi oleh tim, paling lambat satu minggu setelah Perkada tentang RKPD ditetapkan. Setelah diverifikasi dan disempurnakan kembali oleh DPPKBPPPA, rancangan akhir Renja diserahkan kembali ke Bapelitbang untuk diajukan penetapannya paling lambat satu bulan setelah Perkada RKPD ditetapkan.

Setiap tahapan penyusunan Renja Perangkat Daerah ini, merupakan bagian yang tidak terlepas dari tahapan proses penyusunan RKPD Pemerintah Daerah. Rancangan awal Renja Perangkat Daerah merupakan bahan dalam penyusunan rancangan awal RKPD. Rancangan awal RKPD setelah penyempurnaan berdasarkan konsultasi publik merupakan penyempurnaan rancangan awal Renja Perangkat Daerah. Selanjutnya rancangan Renja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kesesuaian dan keselarasannya dengan rancangan awal RKPD, merupakan bahan penyempurnaan rancangan awal RKPD menjadi rancangan RKPD. Rancangan akhir RKPD dibahas bersama Kepala Perangkat Daerah untuk memastikan program dan kegiatan Perangkat Daerah telah diakomodir dalam rancangan akhir RKPD. Perumusan rancangan akhir Renja diverifikasi keselarasannya dengan Perkada tentang RKPD oleh Bapelitbang, untuk selanjutnya ditetapkan melalui Peraturan Kepala Daerah.

RKPD Tahun 2024 merupakan kesinambungan upaya pembangunan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan daerah yang secara langsung atau tidak langsung akan berkontribusi untuk mencapai tujuan pembangunan nasional, dimana program-program yang telah ditetapkan akan disinkronkan dengan hasil Musrenbang Nagari, Kecamatan dan Kabupaten. Dengan demikian program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2024 diharapkan dapat memenuhi target RPJMD dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.

Selanjutnya sebagai salah satu Perangkat Daerah dalam lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota, Renja DPPKBPPPA merupakan penjabaran dari Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286).
2. Undang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400).
3. Undang Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421).
4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah);

5. Undang Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Undang Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 2025;
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi,

Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 3);
19. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 140 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Lima Puluh Kota (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 140);
20. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 119 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 119);

21. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2024 ini adalah :

1. Merupakan salah satu bahan yang digunakan untuk penyusunan Rancangan RKPD Kabupaten Lima Puluh Kota
2. Menjabarkan program dan kegiatan sebagaimana tercantum dalam RKPD 2024 sesuai dengan urusan dan kewenangan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
3. Menyediakan suatu acuan dan pedoman pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk tahun 2024.

Berkaitan dengan maksud di atas Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini ditujukan untuk :

1. Memudahkan seluruh jajaran pimpinan dan staf Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam melaksanakan program dan kegiatan pada tahun 2024.
2. Menjadikan pedoman dalam pelaksanaan dan pengawasan program dan kegiatan sesuai dengan kewenangan dan tupoksi sekretariat dan bidang-bidang di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
3. Menjadi salah satu acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Pengendalian Penduduk dan

Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tahun 2024.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2024 ini terdiri dari beberapa BAB sebagai berikut :

- I. Pendahuluan, yang berisi penjelasan tentang latar belakang penyusunan Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, maksud, tujuan, sasaran, ruang lingkup, landasan penyusunan dan sistematika penulisan
- II. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun Lalu, yang berisi evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan capaian Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, analisis kinerja pelayan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan sebagainya.
- III. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah, yang memuat telaahan terhadap kebijakan nasional dan provinsi, tujuan dan sasaran Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan tahun 2024.
- IV. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBPPPA) Tahun Lalu dan Capaian Renstra DPPKBPPPA

Dalam Bab ini dimuat review terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBPPPA) tahun 2022 (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun 2023 (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun 2022. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra DPPKBPPPA berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja DPPKBPPPA tahun-tahun sebelumnya. .

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun lalu, dan realisasi Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan/atau realisasi APBD untuk Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain :

1. Realisasi program / kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan ;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun lalu, dan realisasi Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan/atau realisasi APBD untuk Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sampai tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel. 2.1 berikut ini :

Tabel 2.1
 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja DPPKBPPPA dan Pencapaian Renstra DPPKBPPPA Tahun 2022
 Kabupaten Lima Puluh Kota

PD : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s / d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+ 9)	11 = (10/4)
2 08 02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	96,00 %	95,05%	95,80%	94,91%	99,22%	95,85%	95,32%	99,29%
2 08 02	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan pcepatan PUG melalui PPRG di Perangkat Daerah	90,10 %	80,05%	80,75%	100%	100%	80,80%		
2 08 02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada	Persentase organisasi perempuan yang berpartisipasi dibidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	71%		53%	100%		64%		

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Program dan Hasil Keluaran Kegiatan s / d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2 08 02	Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota									
2 08 02 2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase perempuan yang mendapatkan pemberdayaan ekonomi	80%		75%	100%	75%			
2 08 03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUNAN	Cakupan perempuan korban kekerasan yang mendapatkan pelayanan pada unit layanan terpadu	100%		100%	100%	100%			
2 08 03 2.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Rasio KDRT	0,00329		0,0036	0,006	0,0029			
2 08 03 2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi	Persentase Korban Kekerasan yang mendapatkan pelayanan	100%		100%	100%	100%			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s / d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2 08 03 2.03	Kewenangan Kabupaten/Kota								
2 08 03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase lembaga layanan yang terlatih	100%		100%	100%	100%		
2 08 04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase pemenuhan lima pilar Indikator ketahanan keluarga	80%					50%	
2 08 04 2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan gender dan hak anak	80%					50%	
2 08 04 2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas	Persentase pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan	80%					0	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s / d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2 08 04 2.03	Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	KG dan hak anak	80%				0			
2 08 05	Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Presentase penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak	100%			100%	100%			
2 08 05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase Informasi Layak Anak	100%			100%	100%			
2 08 05 2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah	Jumlah media informasi	3 media			3 BUAH	3 media			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Program dan Hasil Keluaran Kegiatan s / d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2 08 06	Kabupaten/kota		KLA		Nindya	Pratama	Nindya			
2 08 06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Tingkat Capaian Kabupaten Layak Anak	100%		80%	100%	80%			
2 08 06	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/kota	Persentase Kecamatan Layak Anak	100%		80%	100%	80%			
2 08 06	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/kota	Persentase Pembentukan Forum Anak Kecamatan	100%		85%	100%	85%			
2 08 07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Cakupan anak korban kekerasan yang mendapatkan pelayanan pada unit layanan terpadu	100%		100%	100%	100%			
2 08 07	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang	Persentase penurunan kekerasan	0,017%		0,067	65%	0,067%			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s / d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2 08 07 2.02	Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	terhadap anak	100%		100%	100%	100%			
2 08 07 2.03	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penyediaan lembaga layanan	100%		100%	100%	100%			
2 08 07 2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/kota	Persentase lembaga layanan yang terlatih	100%		100%	100%	100%			
2 14 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pelaksanaan program penunjang urusan pemerintahan daerah	95%	95%	95%	95%	95%	95%	100%	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s / d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2 14 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinergitas perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	95%	95%	95%	95%	100%	95%	100%	
2 14 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah	95%	95%	95%	95%	100%	95%	100%	
2 14 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah	95%	95%	95%	95%	100%	95%	100%	
2 14 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah	95%	95%	95%	95%	100%	95%	100%	
2 14 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	50%	95%	95%	95%	100%	95%	100%	
2 14 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	95%	95%	95%	95%	100%	95%	100%	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s / d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2 14 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	95%	95%	95%	95%	100%	95%	100%	
2 14 02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	0,95		1,25	1,09		1,20		
2 14 02 2.01	Penaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Persentase kebijakan provinsi yang ditindaklanjuti dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk	100%					100%		
2 14 02 2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemetaan perkiraan pengendalian penduduk	80%		60%	90%		60%		
2 14 03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA	Persentase CPR (Contraceptive	75,00%		73,5	67,42		74,30%		

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2	14	03	2.01	(KB)	Prevalence Rate)	65%				
					Persentase promosi KBPK terhadap keluarga dan kampung KB	60%	53%	62,30%		
2	1403	2.02			Cakupan PKB yang di dayagunakan	37,97%	37,71	37,71%		
2	403	2.03			Persentase penggunaan kontrasepsi jangka panjang	28,20%	73,5%	26,70%		
2	1403	2.04			Persentase organisasi kemasyarakatan yang berperan di kampung KB	65%	50%	55%		

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s / d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja) PD Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2	1404	Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	2,16		2,24	2,45	2,22			
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)								
2	1404	2.01 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	85%		75%	65%	77%			
2	1404	2.02 Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui	100%				100%			
		Persentase keluarga aktif mengikuti kegiatan tribina								
		Persentase organisasi kemasyarakatan yang berperan dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga								

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s / d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga									

1.1.1. Realisasi program / kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja / hasil keluaran yang direncanakan.

Program dan kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja / hasil keluaran yang direncanakan selama tahu 2022, antara lain :

Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera, Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) direncanakan target pencapaiannya 100%, namun hanya terealisasi sebesar 38,74%, hal ini disebabkan kegiatan pembekalan/pelatihan Tim Pendamping Keluarga (TPK) yang ada pada setiap nagari baru terlaksana pada bulan Juli dan Agustus 2022, sehingga pencairan dana pulsa baru bisa dilaksanakan mulai bulan Agustus 2022 demikian juga dana kegiatan honorarium TPK optimal dicairkan pada bulan Agustus 2022

1.1.2. Realisasi Program/Kegiatan Yang Telah Memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran Yang Direncanakan

I. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

1. Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 10.000.000, dan realisasi keuangan sebesar Rp. 9.999.900 atau 100%.
2. Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.

239.000.000, dan realisasi keuangan sebesar Rp. 238.296.500 atau 99,71%.

3. Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 10.000.000, dan realisasi keuangan sebesar Rp. 10.000.000 atau 100%.

II. Program Perlindungan Perempuan

1. Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 40.329.500 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 39.008.000 atau 96,72%.
2. Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 26.278.000, dan realisasi keuangan sebesar Rp. 5.538.000 atau 21,07%

III. Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak

1. Kegiatan Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 52.950.300 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 52.949.400 atau 100%

IV. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)

1. Kegiatan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 4.850.000 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 4.806.000 atau 99,09%
2. Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.245.800 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 2.243.800 atau 99,91%

V. Program Perlindungan Khusus Anak

1. Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 27.374.100 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 27.206.600 atau 99,39%
2. Kegiatan Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 74.763.000 dan realisasi keuangan sebesar Rp 25.932.500 atau 34,69%
3. Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota , dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 38.817.200 dan realisasi keuangan sebesar Rp.38.145.900 atau 98,27%

URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 4.210.000 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 4.179.000 atau 99,26%
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.761.784.021 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 2.709.662.116 atau 98,11%
3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 182.862.400 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 182.819.261 atau 99,98%

4. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 258.122.200 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 255.951.309 atau 99,16%
5. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 110.355.000 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 110.149.916 atau 99,81%

II. Program Pengendalian Penduduk

1. Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 128.955.000 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 126.745.742 atau 98,29%

III. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)

1. Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 869.654.000 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 743.925.434 atau 85,54%
2. Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB), dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 876.821.400 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 855.740.369 atau 97,60%
3. Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 578.298.300 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 462.018.400 atau 79,89%
4. Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB,

dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 467.800.000 dan realisasi keuangan sebesar Rp467.763.800 atau 99,99%.

1.1.3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

Pada tahun 2022 tidak ada program/ kegiatan yang melebihi target kinerja/keluaran yang direncanakan

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan.

Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

Capaian kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berhubungan dengan dasar pembentukan Dinas sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 119 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pencapaian kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak disajikan dalam tabel analisis pencapaian kinerja sebagai berikut:

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan DPPKBPPPA Kabupaten Lima Puluh Kota

No	Indikator	IKD	IKU PD	Target Renstra PD			Realisasi Capaian			Proyeksi Tahun		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2024	Tahun 2025	
1.	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	√		8,19%	8,59%	9,01%	6,9%		9,01%			
2.	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD	√		8,57%	8,57%	8,57%	5,71%		8,57%			
3.	Rasio KDRT	√		0,004	0,004	0,003	0,0036		0,003			
4.	Partisipasi angkatan kerja perempuan	√		42000	45000	99750	83161		99750			
5.	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	√		100%	100%	100%	100%		100%			

6.	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A danPPT/PKT di Rumah Sakit	√	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
7.	Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu	√	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
8.	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	√	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
9.	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	√	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
10.	Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	√	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
11.	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	√	0,0036	0,0029	0,0029	0,0029	0,0029	0,0029	0,0029	0,0029		

12.	Perseniase ARG (Anggaran responsif Genderpada belanja langsung APBD)	√	5,06%	5,06%	6,1%	2,8%	6,1%	
13.	Keluarga Pra Sejahtera dan KeluargaSejahtera I	√	3,9%	3,7%	3,6%	4,71	3,6%	
14.	Laju pertumbuhan penduduk (LPP)	√	1,25	1,20	1,1	1,27	1,1	
15.	Total Fertility Rate (TFR)	√	2,24	2,22	2,20	2,48	2,20	
16.	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB	√	50%	55%	60%	45%	60%	
17.	Ratio Akseptor KB	√	1 : 6	1 : 6	1 : 5	1 : 1,4	1 : 5	
18.	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 - 49	√	73,5%	74,3%	74,6%	73,66%	74,6%	
19.	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun(ASFR 15-19)	√	23	23	22	21	22	

20.	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istinya dibawah 20 tahun	√	0,7%	0,6%	0,6%	0,63%	0,6%	0,6%	0,6%
21.	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)	√	10,1%	9,1%	8,63%	13,93	8,63%	8,63%	8,63%
22.	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	√	26,3%	26,7%	27,1%	24,7%	27,1%	27,1%	27,1%
23.	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	√	75%	77%	80%	78,2%	80%	80%	80%
24.	Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB	√	75%	77%	80%	70,5%	80%	80%	80%
25.	Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB	√	80%	82%	83%	80,9%	83%	83%	83%
26.	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan	√	2	5	6	13	6	6	6
27.	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk	√	76%	76%	78%	75%	78%	78%	78%

28.	Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri	√	65%	65%	70%	65.2%	70%	70%	
29.	Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan	√	1 : 1,3	1 : 1,2	1 : 1,2	1 : 1	1 : 1,2	1 : 1,2	
30.	Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	√	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
31.	Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan	√	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
32.	Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa	√	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
33.	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	√	60%	65%	65%	65.8%	65%	65%	
34.	Cakupan keluarga yang mempunyai balitadan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	√	60%	65%	65%	65.2%	65%	65%	

35.	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	√		73,5%	74,3%	74,6%	73,66%		74,6%	
36.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)		√	95,80%	95,85%	95,90%	95,05%		95,95%	96,00%
37.	Rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)		√	0,0036	0,0029	0,0029			0,0029	0,0029
38.	Rasio kekerasan terhadap anak		√	0,0036	0,0029	0,0029			0,0029	0,0029
39.	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)		√	1,25	1,20	1,1			0,95	0,95
40.	Nilai AKIP		√	68	69	69			70	70
41.	Nilai IRB		√	16	16	17			17	18
42.	Nilai IKM		√	85	85	85			85	85

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Berdasarkan analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah, kajian hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah, serta kajian terhadap pencapaian kinerja Renstra Perangkat Daerah, maka dirumuskan isu-isu penting yang terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dirumuskan sebagai berikut :

1. Masih kurangnya peran masyarakat dalam pengembangan KB secara mandiri;
2. Masih kurangnya jumlah akseptor KB dan pendistribusian alat kontrasepsi gratis / murah kepada pasangan usia subur;
3. Masih kurangnya sosialisasi pengembangan program KB bagi keluarga miskin;
4. Belum optimalnya pembinaan dan pengembangan keluarga sejahtera
5. Masih lemahnya tingkat keberdayaan perempuan dan kesetaraan gender;
6. Belum optimalnya upaya perlindungan perempuan dan anak.

Tantangan dalam meningkatkan pelayanan perangkat daerah antara lain :

- a. Masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang informasi kependudukan

- b. Masih adanya fenomena kesenjangan gender
- c. Masih tingginya tingkat kekerasan pada perempuan dan anak

Sedangkan peluang yang dimiliki antara lain :

- a. Dukungan penuh dari pimpinan pemerintah daerah dalam pelaksanaan tugas dan fungsi
- b. Sudah tersedianya regulasi di daerah dalam pelaksanaan program dan kegiatan
- c. Dukungan penuh dari kader KB dan organisasi perempuan dalam mendukung program dan kegiatan
- d. Adanya dukungan penuh dari stakeholder terkait dalam penyelesaian permasalahan perlindungan perempuan dan anak

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Salah satu tujuan dilakukannya review terhadap rancangan awal RKPD adalah untuk menghindari inkonsistensi substansi Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan berbagai rumusan yang sudah tertuang dalam rancangan awal RKPD, karena pada hakikatnya Renja Perangkat Daerah tersebut disusun untuk mendukung pencapaian target prioritas pembangunan serta target program dan kegiatan yang sudah dirumuskan dalam Rancangan Awal RKPD. Pada akhirnya Renja Perangkat Daerah juga akan mengalami penyempurnaan setelah Rancangan RKPD tersebut sudah ditetapkan menjadi RKPD dengan Peraturan Bupati.

Adapun hasil perbandingan antara Rancangan Awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan yang tertuang dalam renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terlihat bahwa ada pengurangan jumlah kegiatan. Pengurangan kegiatan dilakukan karena kegiatan tersebut belum menjadi prioritas perangkat daerah. Hasil telaahan terhadap Rancangan Awal RKPD dalam kaitannya dengan analisis kebutuhan Renja Dinas

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak disajikan dalam Tabel 2.3 berikut.

Tabel 2.3

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023
Kabupaten Lima Puluh Kota

PD Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana	Catatan penting
	Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan		Indeks Pembangunan Gender (IPG)	95,85%	1.282.049.470	Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan		Indeks Pembangunan Gender (IPG)	95,80%	132.149.500	
			Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	46,95%							
	Pelebmbagaan PUG pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kab/Kota		Persentase peningkatan percepatan PUG melalui PPRG di Perangkat Daerah	80,80%	242.372.370	Pelebmbagaan PUG pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kab/Kota		Persentase peningkatan percepatan PUG melalui PPRG di Perangkat Daerah	80,85%	2.493.600	
	Koordinasi dan sinkronisasi perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	DPPKBPPA	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi terkait pelaksanaan PUG	15 Kali	79.540.670	Koordinasi dan sinkronisasi perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	DPPKBPPA	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Dokumen	993.600	

No	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan						
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana	Catatan penting
			kebijakan yang disusun								
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kewenangan Kabupaten/Kota	DPPKBPPA	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi terkait pelaksanaan PUG	6 kali	20.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kewenangan Kabupaten/Kota	DPPKBPPA	Jumlah Dokumen Hasil koordinasi dan sinkronisasi terkait pelaksanaan PUG	43 Dokumen	1.000.000	
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	DPPKBPPA	Jumlah sosialisasi terkait peran perempuan dibidang sosial, politik dan hukum serta PUG	43 Perangkat Daerah	64.559.550						
			Jumlah workshop, bimtek, pelatihan, sosialisasi terkait peran perempuan dibidang sosial, politik dan hukum	5 kali							
	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	DPPKBPPA	Persentase anggaran yang responsif gender (ARG) pada belanja langsung APBD	5,56%	78.272.150	Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	DPPKBPPA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan	43 Perangkat Daerah	500.000	

Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan							
No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikator	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana	Catatan penting
	Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi		advokasi								
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota		Persentase perempuan yang mendapatkan pemberdayaan ekonomi	75,0%	129.602.000	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota		Persentase perempuan yang mendapatkan pemberdayaan ekonomi	75,0%	128.656.900	
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	DPPKBPPA	Jumlah kegiatan advokasi			Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	DPPKBPPA	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Lembaga	33.310.000	
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	DPPKBPPA	Jumlah pelatihan peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan			Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	DPPKBPPA	Jumlah Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapat peningkatan kapasitas	100 orang	36.021.900	
	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)	DPPKBPPA	Jumlah lokasi pembinaan dan penyuluhan terhadap	13 Kecamatan 4 Kali	129.602.000	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)	DPPKBPPA	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	12 Dokumen	59.324.000	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana	Catatan penting
	Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota		perempuan dan kelompok perempuan Jumlah pelatihan peningkatan kapasitas perempuan			Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota		Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia			
	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN		Cakupan perempuan korban kekerasan yang mendapatkan pelayanan pada unit layanan terpadu	100,0%	641.971.110	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN		Cakupan perempuan korban kekerasan yang mendapatkan pelayanan pada unit layanan terpadu	100%	125.400.000	
	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		Rasio KDRT	0,0029	369.224.130	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		Rasio KDRT	0,0029	72.532.500	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		diseminasi data kekerasan bagi lembaga P2TP2A, K3N, PUSPAGA, WCC Koordinasi kegiatan ke kecamatan singkronisasi kegiatan ke provinsi sosialisasi peraturan perundangan	1 kali 45 kali 40 kali 1 kali 1 kali	235.010.600	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	DPPKBP	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	12 dokumen	29.600.000	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatorif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana	Catatan penting
			sosialisasi TPPO								
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	DPPKBPPA	Advokasi ke KGN dan TPPO advokasi ke P2TP2A dan WCC Pendampingan layanan korban kekerasan dan TPPO	20 kali 45 kali 45 kali	134.213.530	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	DPPKBPPA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Perangkat Daerah	42.932.500	
	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten / Kota		Persentase Korban Kekerasan yang mendapatkan pelayanan	100,0%	-	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten / Kota		Persentase Korban Kekerasan yang mendapatkan pelayanan	100%	31.268.000	
	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kabupaten/Kota	DPPKBPPA	Jumlah lokasi yang mendapat layanan pengaduan masyarakat								
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan	DPPKBPPA	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan	DPPKBPPA	Jumlah layanan tindak lanjut pengaduan yang memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan	15 layanan		

Rancangan Awal RKP				Hasil Analisis Kebutuhan							
No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana	Catatan penting
	Kabupaten / Kota		korban kekerasan			Kewenangan		Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten / Kota			
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase lembaga layanan yang terlatih	100%	272.746.980	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase lembaga layanan yang terlatih	100 %	57.091.000	
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	DPPKBPPA	Jumlah kegiatan advokasi kebijakan dan pendampingan penyediaan sarana prasarana layanan bagi perempuan korban kekerasan								
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	DPPKBPPA	Pelatihan Peningkatan kapasitas SDM P2TP2A Pelatihan Peningkatan kapasitas SDM Puspaga Pelatihan Peningkatan		272.746.980	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	DPPKBPPA	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan	30 orang	57.091.000	Mendukung IKU OPD

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pegu Indikatorif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana	Catatan penting
			Kapasitas SDM WCC Pelayanan aktif dalam rangka Edukasi PUSPAGA					Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas			
	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	DPPKBPPA	Jumlah paket kebutuhan spesifik bagi perempuan dalam situasi darurat dan kondisi khusus								
	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	DPPKBPPA	Jumlah kordinasi dan sinkronisasi antar lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan								
	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA		Persentase pemenuhan lima pilar indikator ketahanan keluarga	50%	20.000.000	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA		Persentase pemenuhan lima pilar indikator ketahanan keluarga	50%	202.390.000	
	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan gender dan hak	50%	20.000.000	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan gender dan hak	50%	202.390.900	

Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan							
No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana	Catatan penting
			anak					anak			
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	DPPKBPPA	Jumlah kegiatan advokasi kebijakan dan pendampingan	4 kali	20.000.000						
	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	DPPKBPPA	Jumlah kegiatan KIE KG dan perlindungan anak								
	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	DPPKBPPA	Jumlah kegiatan pengembangan masyarakat untuk peningkatan kualitas keluarga			Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	DPPKBPPA	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	12 dokumen	202.390.000	
	Penguatan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota		Persentase pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG								

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatorif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana	Catatan penting
			dan hak anak								
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	DPPKBPPA	Jumlah advokasi kebijakan dan pendampingan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga								
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	DPPKBPPA	Jumlah pelatihan peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga								
	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	DPPKBPPA	Jumlah kordinasi dan sinkronisasi antar lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga								
	Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota		Presentase penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak								

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatorif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana	Catatan penting
	<p>Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota</p>	DPPKBPPA	Jumlah penyediaan layanan komprehensif bagi keluarga daam mewujudkan KG dan perindungan anak								
	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK		Persentase Informasi Layak Anak	100%	387.444.750	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK		Persentase Informasi Layak Anak	100%	102.687.700	
	Pengumpulan, Pengolahan Analists dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah media informasi	3 buah	387.444.750						
	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	DPPKBPPA	Jumlah buku profil Pengumpulan data PHA dan Indikator KLA untuk penyusunan buku profil Rapat tim penyusun buku Sosialisasi buku profil dan disseminasi data profil	50 buah 17 dokumen 2 kali 1 kali	165.141.900						

Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan							
No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatorif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana	Catatan penting
	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	DPPKBPPA	Jumlah promosi dan edukasi melalui media luar ruang Jumlah promosi melalui media elektronik Jumlah promosi melalui media massa Publikasi buku profil anak	15 buah 25 kali 10 media 2 kal	222.302.850						
	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)		Tingkat Capaian Kabupaten Layak Anak	Nindya	792.573.650	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)		Tingkat Capaian Kabupaten Layak Anak	Nindya	78.000.000	
	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota		Persentase Kecamatan Layak Anak	80,0%	238.492.100	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota		Persentase Kecamatan Layak Anak	90,0%	78.000.000	
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	DPPKBPPA	Jumlah Keputusan Bupati Jumlah MOU Jumlah PERBUP	1 dokumen 1 Dokumen 1 dokumen	159.429.600	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	DPPKBPPA	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non	25 Organisasi	78.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana	Catatan penting
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	DPPKBPPA	Jumlah Koordinasi rapat koordinasi jumlah singkronisasi rapat gugus tugas KLA	10 lembaga 2 buah 10 kali 4 kali	79.062.500			Pemerintah, Media dan Dunia Usaha			
	Penguatan Pengembangan Penyedia Peningkatan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		Persentase Pembentukan Forum Anak Kecamatan	85,0%	554.081.550						
	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	DPPKBPPA	Jumlah kegiatan ajang kreatifitas forum anak operasional layanan puspaga Peningkatan SDM PUSPAGA	2 kali 3 kali 12 bulan 12 bulan	252.844.130						
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat	DPPKBPPA	pendampingan Festival Inovasi Fantasi anak (FIFA) Pendampingan forum anak	10 orang 4 kali 10 orang 10 kali	190.605.800						

No	Rancangan Awal RKP				Hasil Analisis Kebutuhan						
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana	Catatan penting
	Daerah Kabupaten/Kota		daerah, kecamatan dan nagari pendampingan forum anak nasional pendampingan forum anak propinsi								
	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	DPPKBPPA	Advokasi dan sosialisasi organisasi sahabat anak Advokasi dan sosialisasi pembentukan Media Sahabat anak komunikasi melalui banner, leaflet, booklet, baliho sosialisasi dan advokasi pembentukan Asosiasi perusahaan sahabat anak (APSAI) Sosialisasi dan advokasi pembentukan Pusat Informasi Sahabat Anak	110.631.620							

Hasil Analisis Kebutuhan

Rancangan Awal RKPD

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana	Catatan penting
			(PISA)PISA								
	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah kordinasi dan sinkronisasi antar lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak								
	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK		Cakupan anak korban kekerasan yang mendapatkan pelayanan pada pelayanan terpadu	100%	477.061.610	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK		Cakupan anak korban kekerasan yang mendapatkan pelayanan pada pelayanan terpadu	100 %	602.599.500	
	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		Persentase penurunan kekerasan terhadap anak	0,067%	153.919.990	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		Persentase penurunan kekerasan terhadap anak	0,050 %	185.367.500	
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Koordinasi dan Sinkronisasi	DPPKBPPA	Jumlah Keputusan Bupati Jumlah MOU PERBUP Jumlah Sosialisasi	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 2 Kali	138.919.990						
		DPPKBPPA	Jumlah bulan	12 bulan	15.000.000	Advokasi dan pendampingan	DPPKBPPA	Jumlah SDM yang	150 orang	185.367.500	

Rancangan Awal RKPD										Hasil Analisis Kebutuhan			
No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana	Catatan penting		
	Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten / Kota		pendampingan			Perangkat Daerah dalam Pelaksanaan Kebijakan / Program /Kegiatan Pencegahan KTA		mempereleh advokasi dan pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan / program / kegiatan pencegahan KTA					
	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase penyediaan lembaga layanan	100%	152.576.500	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							
	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	DPPKBPPA	Jumlah bulan pendampingan	12 bulan	10.000.000								
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	DPPKBPPA	Jumlah Koordinasi Ke Kecamatan Jumlah Pendampingan Kasus Jumlah Rapat Sosialisasi Kegiatan Pencegahan Kekerasan Pada	50 Kali 50 Kasus 2 Kali 2 Kali 45 Kali	142.576.500	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK		Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	150 orang	315.572.000			

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatorif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana	Catatan penting
			Anak Sinkronisasi Kegiatan Ke Propinsi								
	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	DPPKBPPA	Jumlah pendampingan								
	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	DPPKBPPA	Jumlah pendampingan								
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase lembaga layanan yang terlatih	100%	170.555.120	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase penyediaan lembaga layanan	100 %	101.660.000	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan	DPPKBPPA	Jumlah pendampingan								

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana	Catatan penting
	Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota										
	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	DPPKBPPA	Jumlah pelatihan peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus	1 kali	10.000.000	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten / kota	DPPKBPPA	Jumlah SDM penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus	100 orang	101.660.000	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	DPPKBPPA	Advokasi Dunia Usaha Advokasi Media Jumlah Workshop MOU Dunia Usaha MOU Media	3 Kali 2 Kali 2 Kali 2 Dokumen 2 Dokumen	160.555.120						
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		Persentase pelaksanaan program penunjang urusan pemerintahan daerah	95%	5.585.040.403	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		Persentase pelaksanaan program penunjang urusan pemerintahan daerah	95%	3.351.940.223	

Hasil Analisis Kebutuhan

Rancangan Awal RPKD

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana	Catatan penting
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase sinergisitas perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	95%	25.404.610	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase sinergisitas perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	95%	23.092.500	
	Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah	DPPKBPPA	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	2 dokumen	7.362.960	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	DPPKBPPA	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	9.114.500	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	DPPKBPPA	Jumlah dokumen RKA SKPD	1 dokumen	1.167.430	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	DPPKBPPA	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 dokumen	3.753.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	DPPKBPPA	Jumlah dokumen perubahan RKA - SKPD	1 dokumen	1.150.930	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	DPPKBPPA	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 dokumen	1.056.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	DPPKBPPA	Jumlah dokumen DPA SKPD	1 dokumen	1.150.930	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	DPPKBPPA	Jumlah Dokumen DPASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	2 dokumen	1.981.000	

Hasil Analisis Kebutuhan

Rancangan Awal RKPD

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana	Catatan penting
	Koordinasi dan Perubahan Dokumen DPA-SKPD	DPPKBPPA	Jumlah dokumen perubahan DPA SKPD	1 dokumen	1.192.950	Koordinasi dan Perubahan Dokumen DPA-SKPD	DPPKBPPA	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 dokumen	1.998.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	DPPKBPPA	Jumlah dokumen kinerja yang tersusun	5 dokumen	11.014.630	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	DPPKBPPA	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	5.190.000	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DPPKBPPA	Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah	4 Dokumen	2.364.780						
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase pelaksanaan administrasi keuangan	95%	3.709.328.993	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase pelaksanaan administrasi keuangan	85%	2.743.308.723	

Rancangan Awal RPKD					Hasil Analisis Kebutuhan						
No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana	Catatan penting
			perangkat daerah					perangkat daerah			
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	DPPKBPPA	Jumlah bulan penyediaan gaji dan tunjangan ASN	12 bulan	3.702.743.953	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	DPPKBPPA	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang/bulan	2.736.782.723	
	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi SKPD	DPPKBPPA	Jumlah Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD								
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	DPPKBPPA	Jumlah dokumen laporan akhir tahun yang tersusun	1 dokumen	6.585.040	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	DPPKBPPA	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	6.526.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	DPPKBPPA	Jumlah dokumen Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD								
	Penyusunan Pelaporan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Jumlah laporan dan Analisis Prognosis Realisasi								

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatf	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana	Catatan penting
			Anggaran								
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase pelaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah	95%	90.750.000						
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	DPPKBPPA	Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	125 stel	68.750.000						
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	DPPKBPPA	Jumlah paket pendidikan dan pelatihan yang diikuti	1 paket	22.000.000						
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah	95%	258.935.930	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah	95%	184.863.000	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	DPPKBPPA	Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 bulan	2.750.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	DPPKBPPA	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	500.000	

Rancangan Awal RKPD										Hasil Analisis Kebutuhan			
No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana	Catatan penting		
	Penyediaan Peralatan dan Peningkatan Kantor	DPPKBPPA	Jumlah bulan Penyediaan Peralatan dan Peningkatan Kantor										
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	DPPKBPPA	Jumlah bulan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga										
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	DPPKBPPA	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	12 bulan	33.106.480	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	DPPKBPPA	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	25.389.800			
	Penyediaan Barang dan Peralatan Penggandaan	DPPKBPPA	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	26.839.450	Fasilitasi Kunjungan Tamu	DPPKBPPA	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	24.482.200			
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	DPPKBPPA	Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan buku peraturan perundang undangan	12 bulan	3.088.800								
	Fasilitasi Kunjungan	DPPKBPPA	Jumlah porsi penyediaan	350 porsi	9.625.000	Fasilitasi Kunjungan		Jumlah Laporan Fasilitasi	1 laporan	5.425.000			

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana	Catatan penting
	Tamu		makan dan minum tamu			Tamu		Kunjungan Tamu			
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DPPKBPPA	Jumlah porsi penyediaan makan dan minum rapat	700 porsi	183.526.200	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DPPKBPPA	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 laporan	128.966.000	
			Jumlah OH yang mengikuti koordinasi dan konsultasi SKPD	600 OH							
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	50%	768.043.100	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	50%	63.350.000	
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	DPPKBPPA									
	Pengadaan Kendaraan Operasional Lapangan	DPPKBPPA	Jumlah unit pengadaan kendaraan dinas/operasional	1 unit	574.278.100						

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan

No	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan penting	
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana
	Pengadaan Mebel	DPPKBPPA	Jumlah paket pengadaan mobiler	1 Paket	109.285.000	Pengadaan Mebel	DPPKBPPA	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	51 Unit	29.350.000
	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	DPPKBPPA	Jumlah paket pengadaan peralatan dan mesin lainnya	1 Paket	84.480.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	DPPKBPPA	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	34.000.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	95%	363.407.770	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	95%	164.560.000
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	DPPKBPPA	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	12 bulan	3.884.100	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	DPPKBPPA	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	750.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	DPPKBPPA	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	56.319.670	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	DPPKBPPA	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	31.950.000
	Penyediaan Jasa dan Peralatan Kantor	DPPKBPPA	Jumlah bulan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor							
	Penyediaan Jasa Umum	DPPKBPPA	Jumlah bulan penyediaan	12 bulan	303.204.000	Penyediaan Jasa Umum	DPPKBPPA	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	1 Laporan	131.880.000

Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan							
No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatorif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana	Catatan penting
	Kantor		Jasa pelayanan umum kantor			Kantor		Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	95%	379.170.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	95%	172.746.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	DPPKBPPA	Jumlah bulan pemeliharaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	12 bulan	293.227.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak, Perizinan Dinas Operasional atau Lapangan	DPPKBPPA	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	89 unit	148.671.000	
	Pemeliharaan Mebel	DPPKBPPA	Jumlah bulan pemeliharaan mebel								
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DPPKBPPA	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	12 bulan	17.743.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DPPKBPPA	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 unit	8.990.000	
	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	DPPKBPPA	Jumlah paket pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	1 paket	68.200.000	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	DPPKBPPA	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	16 unit	15.085.000	

Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan							
No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana	Catatan penting
	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK		Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	1,2	339.528.000	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK		Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	1.2	272.821.600	
	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk		Persentase kebijakan provinsi yang ditindaklanjuti dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk	100%	204.528.000	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		Persentase kebijakan provinsi yang ditindaklanjuti dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk	100%	97.378.000	
	Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Program KBPK)	DPPKBPPA	Jumlah kebijakan daerah dalam pembinaan dan kesejahteraan keluarga melalui kelompok BKB, BKR, BKL dan PIK R Terintegrasi	1 dok	485.559.000						
	Penyerasian dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	DPPKBPPA	Jumlah dokumen GDPK yang tersusun	1 kegiatan	50.000.000	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan	DPPKBPPA	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design	1 Dokumen	97.378.000	

No	Rancangan Awal RKP					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatorif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana	Catatan penting
	(GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota					(GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota		Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota			
	Dukungan Pelaksanaan Survei/Pendataan Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan	DPPKBPPA	Jumlah lokasi pelaksanaan survey / pendataan indeks pembangunan berwawasan kependudukan								
	Pelaksanaan Survei/Pendataan Indeks Pengetahuan Masyarakat tentang Kependudukan	DPPKBPPA	Jumlah lokasi pelaksanaan survey / pendataan indeks pengetahuan masy tentang kependudukan								
	Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	DPPKBPPA	Jumlah lokasi kerjasama pelaksanaan pendidikan								
	Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal	DPPKBPPA	Jumlah lokasi Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan								

Rancangan Awal RPKD		Hasil Analisis Kebutuhan									
No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatorif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana	Catatan penting
			Nonformal								
	Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	DPPKBPPA	Jumlah Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal sesuai Isu Lokal								
	Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	DPPKBPPA	Jumlah Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal sesuai Isu Lokal								
	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	DPPKBPPA	Jumlah Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal								

Rancangan Awal RKP				Hasil Analisis Kebutuhan							
No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikator	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana	Catatan penting
	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal	DPPKBPPA	Jumlah Implementasi Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal								
	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan	DPPKBPPA	Jumlah Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan								
	Advokasi Tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	DPPKBPPA	Jumlah Advokasi Tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan								

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Cepatan	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana	Catatan penting
	Sosialisasi Tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan Kepada Pemangku Kepentingan	DPPKBPPA	Jumlah Sosialisasi Tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan Kepada Pemangku Kepentingan								
	Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	DPPKBPPA	Jumlah sarasehan hasil Pemutakhiran Basis Data Keluarga	1 kali	109.373.000						
	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK	DPPKBPPA	Jumlah Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK								
	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		Persentase pemetaan perkiraan pengendalian penduduk		135.000.000	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		Persentase pemetaan perkiraan pengendalian penduduk	60 %	175.443.600	

Rancangan Awal RKPD										Hasil Analisis Kebutuhan			
No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana	Catatan penting		
	Perumusan Parameter Kependudukan	DPPKBPPA	Jumlah dokumen perumusan kependudukan										
	Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	DPPKBPPA	Jumlah dokumen data kependudukan										
	Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	DPPKBPPA	Jumlah dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga										
	Pemetaan Kependudukan	DPPKBPPA	Jumlah Pemetaan Kependudukan										
	Penyusunan Kajian Dampak Kependudukan	DPPKBPPA	Jumlah Penyusunan Kajian Dampak Kependudukan										
	Pengembangan Model Solusi Strategis Pengendalian Dampak Kependudukan	DPPKBPPA	Jumlah dokumen Pengembangan Model Solusi Strategis Pengendalian Dampak Kependudukan										

Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan							
No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana	Catatan penting
	Pengukuran dan Perhitungan Indikator Kerentanan Dampak Kependudukan (Early Warning System/Peringatan Dini)		Jumlah dokumen Pengukuran dan Perhitungan Indikator Kerentanan Dampak Kependudukan (Early Warning System/Peringatan Dini)								
	Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain	DPPKBPPA	Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain yang terbentuk								
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	DPPKBPPA	Jumlah lokasi Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga								
	Pemanfaatan Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	DPPKBPPA	Jumlah dokumen Data Hasil Pemutakhiran								

Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan penting			
No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana
			Data Keluarga								
	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	DPPKBPPA	Jumlah dokumen Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	1 dok	10.000.000	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	DPPKBPPA	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	30 Dokumen	50.032.000	
	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	DPPKBPPA	Jumlah dokumen Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	1 dok	125.000.000						
	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	DPPKBPPA	Jumlah Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB			Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	DPPKBPPA	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	79 Dokumen	125.411.600	
	Pembinaan dan Pengawasan Pelaporan Program KKBP	DPPKBPPA	Jumlah lokasi Pembinaan dan Pengawasan Pelaporan Program KKBP								
	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)		Persentase CPR (Contraceptive Prevalence Rate)	74,30%	8.450.890.097	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)		Persentase CPR (Contraceptive Prevalence Rate)	74,30 %	2.989.928.480	

Rancangan Awal RKP				Hasil Analisis Kebutuhan							
No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana	Catatan penting
	<p>Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal</p>		<p>Persentase promosi KKBPBPK terhadap keluarga dan kampung KB</p>	62,30%	4.267.282.857	<p>Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal</p>		<p>Persentase promosi KKBPBPK terhadap keluarga dan kampung KB</p>	63 %	1.308.972.780	
	<p>Advokasi KKBPBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja</p>	DPPKBPPA	<p>Jumlah pertemuan advokasi/KIE kepada stakeholder</p>	13 kali	75.685.280	<p>Advokasi Program KKBPBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja</p>	DPPKBPPA	<p>Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja</p>	12 organisasi	4.375.000	
	<p>Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal</p>	DPPKBPPA	<p>Jumlah lokasi penyuluhan advokasi dan promosi program KKBPBPK</p>	13 Kecamatan	737.151.250	<p>Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal</p>	DPPKBPPA	<p>Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal</p>	13 Dokumen	25.000.000	
	<p>Penyediaan dan Distribusi</p>	DPPKBPPA	<p>Jumlah pembuatan</p>	13 paket	55.000.000						

Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan							
No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana	Catatan penting
	Sarana KIE Program KKBPK		pamflet, lembar balik KKBPK								
	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	DPPKBPPA	Jumlah promosi KKBPK di radio	4 kali	55.000.000	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	DPPKBPPA	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	316 Dokumen	70.640.000	
	Penggunaan Media Cetak, Elektronik dan Media Lainnya sesuai Kearifan Budaya Lokal Dalam Pencitraan Program KKBPK	DPPKBPPA	Jumlah media massa cetak Elektronik dan Media Lainnya sesuai Kearifan Budaya Lokal Dalam Pencitraan Program KKBPK								
	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat	DPPKBPPA	Jumlah Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa	4 kali	200.000.000	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat	DPPKBPPA	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana (Pembangunan	105 Laporan	202.800.000	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikator	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana	Catatan penting
	Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)		(Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)					Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)			
	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	DPPKBPPA	Jumlah pengadaan sarana dan pra sarana Balai Penyuluhan KKBPK	1 Kegiatan	2.737.002.180	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	DPPKBPPA	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	13 Laporan	967.157.780	
	Pengendalian Program KKBPK	DPPKBPPA	Jumlah kegiatan pertemuan di kabupaten dan kecamatan	14 kali	407.444.147	Pengendalian Program KKBPK	DPPKBPPA	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	246 Laporan	40.000.000	
	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)		Cakupan PKB yang didayagunakan	37,71%	1.342.355.960	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)		Cakupan PKB yang didayagunakan	37,71%	483.200.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatorif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana	Catatan penting
	Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	DPPKBPPA	Jumlah lokasi Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB								
	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	DPPKBPPA	Jumlah paket Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB								
	Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluhan Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	DPPKBPPA	Jumlah pertemuan dalam rangka Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluhan Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)								
	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	DPPKBPPA	Jumlah bulan operasional kader PPKBN dan PPKBJ	12 bulan	1.342.355.960	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	DPPKBPPA	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat	716 Orang	483.200.000	

Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan							
No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana	Catatan penting
			Jumlah pertemuan peningkatan kapasitas kader	12 kali				Pedesaan (IMP)			
	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten/Kota		Persentase penggunaan kontrasepsi jangka panjang	26,7%	1.497.483.780	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten/Kota		Persentase penggunaan kontrasepsi jangka panjang	26,7 %	676.835.700	
	Pengendalian dan Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk dan Jejaringnya	DPPKBPPA	Jumlah fasilitas kesehatan yang mendapat distribusi alokasi	37 Faskes	84.283.080	Pengendalian dan Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk dan Jejaringnya	DPPKBPPA	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk dan Jejaringnya	37 Laporan	89.410.100	
	Peningkatan Kompetensi Pengelola Pelugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB	DPPKBPPA	Jumlah pertemuan dan sosialisasi dengan badan klinik dan PKB	2 kali	83.485.500						

Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan							
No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana	Catatan penting
	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	DPPKBPPA	Jumlah pelayanan KB MKJP	13 kecamatan	1.021.465.200	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	DPPKBPPA	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	11079 Orang 9 Kecamatan	534.834.200	
	Penyediaan Dukungan Ayoman Kegagalan Penggunaan MKJP	DPPKBPPA	Jumlah Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP								
	Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang	DPPKBPPA	Jumlah fasilitas kesehatan yang mendapat distribusi	37 Faskes	100.000.000						
	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	DPPKBPPA	Tersedianya sarana penunjang pelayanan KB	37 paket	20.000.000						
	Pembinaan Paeca Pelayanan bagi Peserta KB	DPPKBPPA	Jumlah pembinaan bagi peserta KB	5 kali	14.250.000						
	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan dan Reproduksi di Fasilitas	DPPKBPPA	Jumlah sosialisasi KB dan kesehatan	13 kali	100.000.000	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan dan Reproduksi di Fasilitas	DPPKBPPA	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga	13 Laporan	52.581.400	

Rancangan Awal RPKPD										Hasil Analisis Kebutuhan			
No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana	Catatan penting		
	Kesehatan termasuk Jaringan Jejaringnya		reproduksi di faskes			Kesehatan termasuk Jaringan Jejaringnya		Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya					
	Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	DPPKBPPA	Jumlah lokasi Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan										
	Peningkatan Kompetensi Pelayanan Keluarga dan Berencana Kesehatan Reproduksi	DPPKBPPA	Jumlah pelatihan Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi										
	Dukungan Operasional Pelayanan Bergerak KB	DPPKBPPA	Jumlah pelayanan KB bergerak dengan mobil pelayanan										

Rancangan Awal RPKD				Hasil Analisis Kebutuhan							
No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatorif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana	Catatan penting
	Promosi dan KB Konseling KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran	DPPKBPPA	Jumlah sosialisasi KB pasca persalinan								
	Peningkatan Kesertaan Pria	DPPKBPPA	Jumlah sosialisasi KB pria								
	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB		Persentase organisasi kemasyarakatan yang berperan di kampung KB	55%	1.343.737.500	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB		Persentase organisasi kemasyarakatan yang berperan di kampung KB	55%	519.320.000	
	Penguatan Peran serta Organisasi Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	DPPKBPPA	Jumlah pertemuan Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB								
	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	DPPKBPPA	Jumlah pertemuan dengan lintas sektor di Kampung KB	28 kali	98.857.500						

Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan							
No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana	Catatan penting
	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBP di Kampung KB	DPPKBPPA	Jumlah pertemuan dan sosialisasi KKBP di Kampung KB	28 kali	1.244.880.000	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBP di Kampung KB	DPPKBPPA	Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB	27 Kampung	519.920.000	
	Pembinaan Terpadu Kampung KB	DPPKBPPA	Jumlah lokasi pembinaan terpadu kampung KB								
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)		Total Fertility Rate (TFR)	2,22	2.567.635.900	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)		Total Fertility Rate (TFR)	2,20	1.933.800.000	
	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		Persentase keluarga aktif mengikuti kegiatan tribina	77%	2.559.814.900	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		Persentase keluarga aktif mengikuti kegiatan tribina	77 %	1.966.068.000	
	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja	DPPKBPPA	Jumlah lokasi Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja								

No	Rancangan Awal RKPDP				Hasil Analisis Kebutuhan						
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatorif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana	Catatan penting
	(PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)		Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)								
	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	DPPKBPPA	Jumlah paket Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)								
	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR,	DPPKBPPA	Jumlah Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan								

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana	Catatan penting
	BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)		Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)								
	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	DPPKBPPA	Jumlah orientasi/pelatihan teknis pelaksana/kader BKB,BKR,BKL,P IK R dan UPPKAS	13 Kecamatan	127.352.500						
	Penyediaan Operasional Pengelola Peleaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	DPPKBPPA	Jumlah kecamatan yang disediakan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Peleaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	13 Kecamatan	1.739.330.400	Penyediaan Operasional Pengelola Peleaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	DPPKBPPA	Jumlah Kader Pengelola dan Peleaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	39366 orang	1.787.540.000	

Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan							
No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana	Catatan penting
			dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPP (KS)					S)			
						Perumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	DPPKBPPA	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	1975 Keluarga	12.000.000	
			Jumlah kecamatan yang disediakan Biaya Operasional bagi Kegiatan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPK S)			Penyediaan Biaya Operasional Kelompok Ketahanan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	DPPKBPPA	Jumlah kader pengelola dan pelaksana Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) yang mendapat biaya operasional kegiatan	39366 orang	1.549.800.000	

Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan							
No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana	Catatan penting
	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	DPPKBPPA	Jumlah Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	5 kegiatan	693.132.000						
	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	DPPKBPPA	Jumlah promosi dan sosialisasi kelompok kegiatan Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, dan Pengelolaan Keuangan keluarga	5 kegiatan	693.132.000	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	DPPKBPPA	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan sosialisasi Kelompok Kegiatan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	156 laporan	12.000.000	
	Penyerasian dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung	DPPKBPPA	Jumlah pertemuan Koordinasi BKB Holistik Integratif								

Rancangan Awal RPKD		Hasil Analisis Kebutuhan									
No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatorif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana	Catatan penting
	Tercapainya IPK										
	Penyediaan dan Pengembangan Materi IPK	DPPKBPPA	Jumlah dokumen pengembangan materi IPK								
	Advokasi dan Promosi IPK	DPPKBPPA	Jumlah Advokasi dan Promosi IPK								
	Sosialisasi IPK	DPPKBPPA	Jumlah Sosialisasi IPK								
	Pelaksanaan Koordinasi Evaluasi Pencapaian IPK	DPPKBPPA	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Evaluasi Pencapaian IPK								
						Pengadaan sarana kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPPKA)	DPPKBPPA	Jumlah unit sarana kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPPKA)	760 unit	360.000.000	
	Pelaksanaan Peningkatan Peran dan Serta		Persentase organisasi	100%	7.821.000						

Rancangan Awal RKP		Hasil Analisis Kebutuhan									
No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikator	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana	Catatan penting
	Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembinaan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		kemasyarakatan yang berperan dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga								
	Penguatan Kebijakan Daerah dalam Rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan dan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	DPPKBPPA	Jumlah kebijakan daerah dalam pembinaan dan ketahanan dan kesejahteraan keluarga melalui kelompok BKB, BKR, BKL dan PIK R Terintegrasi		7.821.000						
	Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan	DPPKBPPA	Jumlah mitra kerja dan organisasi kemasyarakatan dalam penggerakan operasional pembinaan								

Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan							
No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikator	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana	Catatan penting
	Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)		program ketahanan dan kesejahteraan keluarga								
	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Masyarakat dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	DPPKBPPA	Jumlah pelatihan peningkatan kapasitas mitra dan Organisasi Masyarakat dalam Pengelaaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga								
	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	DPPKBPPA	Jumlah dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja		20.554.154.990					9.632.268.423	

Dari Tabel diatas dapat dijelaskan bahwa terdapat perubahan nomenklatur sub kegiatan berdasarkan Permendagri terbaru.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam menyusun Renja Perangkat Daerah, salah satu tahapan proses yang tidak boleh diabaikan adalah menampung usulan program dan kegiatan yang berasal dari bawah atau aspirasi masyarakat. Hal ini sangat penting dilaksanakan karena pada hakekatnya masyarakatlah yang akan menjadi penerima manfaat dari pogram dan kegiatan kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.

Sebagai salah satu Perangkat Daerah dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berupaya semaksimal mungkin untuk menampung aspirasi masyarakat dengan berbagai cara dan dalam berbagai kesempatan, termasuk salah satunya melalui masukan dari hasil pelaksanaan Musrenbang, baik di tingkat nagari, kecamatan maupun di tingkat kabupaten. Pada 2024 tidak terdapat usulan berdasarkan Pokok-Pokok Pikiran Anggota DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota.

Aspirasi masyarakat akan menjadi perhatian serius DPPKBPPPA dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2024. Suatu langkah penting yang harus diambil adalah kembali menata dan menyusun berbagai peraturan yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan sehingga program dan kegiatan DPPKPPPA dapat dijalankan dengan tertib, terarah, efektif dan efisien. Secara umum program dan kegiatan yang dituangkan dalam Rencana Kerja DPPKBPPPA Tahun 2024 ini sudah menampung dan mengakomodir hasil usulan pemangku kepentingan/masyarakat.

Tabel 2.4
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2024

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
I	Program Pelindungan Khusus Anak				
I.I	Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten / Kota				
I.I.I	Sub Kegiatan Advokasi dan Pendampingan Perangkat Daerah dalam Pelaksanaan Kebijakan Program / Kegiatan Pencegahan KTA	DPPKBPPA			Musrenbang

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Lima Puluh Kota

a. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan permasalahan, prioritas dan sasaran serta rencana program pembangunan daerah. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari semua prioritas dan program pembangunan yang dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan.

Prioritas pembangunan disusun sebagai penjabaran operasional dari Strategi Pembangunan yang digariskan dalam RPJMN 2015-2019 dalam upaya melaksanakan Agenda Pembangunan Nasional untuk memenuhi Nawa Cita, yaitu :

- Cita 1 : Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara ;
- Cita 2 : Mengembangkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya ;
- Cita 3 : Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan ;
- Cita 4 : Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya ;
- Cita 5 : Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia ;
- Cita 6 : Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional ;
- Cita 7 : Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategi ekonomi domestik;

Cita 8 : Melakukan revolusi karakter bangsa ; dan

Cita 9 : Memperteguh kebhinnekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

b. Telaahan terhadap Kebijakan Provinsi Sumatera Barat

Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan bagian dari Provinsi Sumatera Barat. Oleh karena itu keberhasilan pembangunan Sumatera Barat juga sangat dipengaruhi oleh keberhasilan pembangunan di Kabupaten Lima Puluh Kota. Untuk itu, pembangunan di Kabupaten Lima Puluh Kota harus bisa disinkronkan dengan pembangunan di Provinsi Sumatera Barat. Berdasarkan hal tersebut, maka dalam penyusunan renja ini, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak perlu melakukan telaahan terhadap kebijakan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

c. Telaahan terhadap Kebijakan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota

Kebijakan yang akan dituangkan dalam Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini mengacu dan mempedomani RKPD Kabupaten Lima Puluh Kota yang telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

a. Telaahan terhadap Renstra DPPKBPPPA Tahun 2021 - 2026

Visi dan misi Kepala Daerah terpilih sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2021-2026 adalah:

**“MEWUJUDKAN LIMA PULUH KOTA YANG MADANI, BERADAT DAN
BERBUDAYA DALAM KERANGKA ADAT BASANDI SYARAK,
SYARAK BASANDI KITABULLAH ”**

Adapun misi pembangunan sebagai penjabaran visi tersebut sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berbudaya dan berdaya saing berlandaskan keimanan;
 2. Mendorong pertumbuhan dan perkembangan ekonomi lintas sektoral yang memiliki keunggulan ditingkat lokal dan regional;
 3. Mendorong potensi nagari sebagai poros pembangunan daerah;
 4. Meningkatkan kualitas layanan publik melalui reformasi birokrasi seutuhnya;
 5. Meningkatkan pembangunan infrastruktur secara terpadu yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan kualitas kehidupan masyarakat yang lebih baik;
- b. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2024.

Selain merupakan penjabaran Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak maka Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2024 juga merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024. Dalam merumuskan tujuan dan sasaran Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak maka berdasarkan RKPD tersebut diformulasikan permasalahan terkait dengan urusan pemerintahan daerah yang merupakan kewenangan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Permasalahan-

permasalahan tersebut adalah sebagai berikut :

- I. Permasalahan pada urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana
 1. Pemahaman tentang kontrasepsi MKJP masih rendah, sedangkan pemahaman kontrasepsi suntik masih sangat tinggi
 2. Pencapaian CPR tinggi tetapi tidak diiringi dengan penurunan TFR
 3. Jasa medis pemasangan IUD implant bagi peserta JKN belum berjalan dengan semestinya.
 4. Belum semua sekolah mendukung kegiatan PIK remaja.
 5. Masih lemahnya pencatatan dan pelaporan ditingkat kecamatan dalam hal ketepatan waktu dan akurasi serta analisis data
 6. Terbatasnya jumlah dan kualitas tenaga penyuluh KB di lapangan;
 7. Banyaknya kasus² kesehatan reproduksi di masyarakat,
 8. Pengetahuan kader BKB, BKR, dan BKL masih rendah
 9. Pemahaman masyarakat tentang kelompok BKB, BKR, dan BKL masih rendah
 10. Jumlah kader IMP (PPKBN/PPKBJ) masih kurang, terutama di daerah padat penduduk
 11. Standar Anggaran Biaya untuk biaya operasional PPKBN/PPKBJ masih rendah
 12. Operasional kader BKB, BKR, BKL dan UPPKS tidak ada
 13. Pemahaman masyarakat tentang 8 fungsi keluarga masih kurang
 14. Kurangnya sarana BKB Kit dan Kartu Kembang Anak

- II. Permasalahan pada urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
1. Perempuan kurang memiliki kesempatan dan peran dalam pengambilan keputusan, sehingga manfaat yang diperoleh perempuan belum bisa disetarakan dengan kaum laki-laki, yang mengakibatkan fenomena kesenjangan gender di Kabupaten Lima Puluh kota
 2. Upaya fasilitasi peningkatan kualitas SDM SKPD dalam rangka penyusunan rencana dan anggaran yang responsive gender, masih rendah
 3. Masih rendahnya pemahaman eksekutif maupun legislatif tentang PUG dan Pemberdayaan Perempuan sebagai suatu strategi pembangunan, yang menentukan keberhasilan pembangunan di segala bidang
 4. Belum maksimalnya pelaksanaan program dan kegiatan menuju keadilan dan kesetaraan gender.
 5. Semua SDM yang terlibat kegiatan PUG belum dilatih pelatihan pemantapan tupoksi pokja PUG, focal point, pelatihan PPRG maupun penyusunan GAP dan GBS.
 6. Terbatasnya alokasi dana yang ada di kabupaten untuk pelaksanaan program dan kegiatan PUG.
 7. Semakin menipisnya perilaku masyarakat yang mencerminkan adat dan budaya Minangkabau terutama puti bungsu (remaja putri) dan rang mudo
 8. Kemiskinan rumah tangga menjadi faktor penyebab terjadinya KDRT
 9. Belum maksimalnya penataan administrasi organisasi perempuan
 10. Rendahnya wawasan organisasi perempuan untuk

mengangkat kualitas hidup perempuan.

11. Masih tingginya tingkat kekerasan pada perempuan dan anak
12. Belum tersedianya shelter (rumah aman) bagi korban tindak kekerasan

Berdasarkan permasalahan pada kedua urusan pemerintahan yang dilaksanakan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana tersebut di atas maka ditetapkanlah tujuan dan sasaran Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2024 sebagai berikut :

A. Tujuan

1. Meningkatkan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
2. Meningkatkan keluarga berencana dan keluarga sejahtera
3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik

B. Sasaran :

C. Meningkatnya kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan

D. Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak

1. Meningkatnya kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan
2. Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak
3. Meningkatnya Pengendalian Laju Pertumbuhan Penduduk
4. Meningkatnya kualitas dan kuantitas kinerja dan pelayanan perangkat daerah

3.3 Program dan Kegiatan

Penetapan program dan kegiatan DPPKBPPPA untuk Rencana Kerja DPPKBPPPA Tahun 2024 mengacu kepada program dan kegiatan yang ada dalam Renstra DPPKBPPPA Tahun 2021-2026. Adapun pencantuman nomenklatur program dan kegiatan mengacu kepada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sebagaimana dapat dilihat pada tabel-tabel berikut :

Tabel 3.4.
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Lingkup Urusan Pembedayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
I	Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan		
		1. Pelembagaan PUG pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kab/Kota	
			1. Koordinasi dan sinkronisasi perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG
			2. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG
			3. Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG
		2. Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik,	

		Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	
			4. Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi
		3. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	
			5. Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
II	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN		
		4. Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	
			6. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
			7. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
		5. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah	

		Kabupaten/Kota	
			8. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota
III	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK		
		6. Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/kota	
			9. Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota
			10. Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota
IV	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)		
		7. Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	
			11. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
			12. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak

			Kewenangan Kabupaten/Kota
		8. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	
			13. Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
			14. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
			15. Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
V	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK		
		9. Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	
			16. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
		10. Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan	

		Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
			17. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota
		11. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
			18. Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Berdasarkan Tabel diatas dapat disimpulkan yaitu Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Tahun 2024 akan melaksanakan 5 Program, 11 Kegiatan dan 18 Sub Kegiatan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Ringkasan program, kegiatan dan sub kegiatan penunjang urusan Pemerintah Daerah dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.5.
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
I.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		
		1. Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
			1. Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah
			2. Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan
			3. Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah
			4. Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah
			5. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		2. Administrasi Keuangan	
			6. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
			7. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
			8. Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi
			9. Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
			10. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
			11. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
			12. Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
			13. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
		3. Administrasi Umum	
			14. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

			15. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
			16. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
			17. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
			18. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
			19. Penyediaan Alat Tulis Kantor
			20. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
			21. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
			22. Penyediaan Makanan dan Minuman
			23. Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
			24. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
			25. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
			26. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
			27. Pengadaan Mebeleur
			28. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
			29. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
			30. Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor
		4. Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	
			31. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
			32. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
			33. Pendidikan dan Pelatihan Formal

Berdasarkan Tabel diatas dapat disimpulkan yaitu Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak pada Tahun 2024 akan melaksanakan 1 Program, 4 Kegiatan dan 33 Sub Kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah.

Tabel 3.6.
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Lingkup Urusan
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
I.	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK		
		1. Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	
			1. Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Program KKBPK)
II.	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)		
		2. Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	
			2. Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal
			3. Pengelolaan operasional dan sarana di balai

			penyuluhan KKBPK
			4. Pengendalian Program KKBPK
		3. Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	
			5. Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)
		4. Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten/Kota	
			6. Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
			7. Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB
III.	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)		
		5. Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	
			8. Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
			9. Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana,

			Kelanjutusiaan Serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)
			10. Penyerasian Kebijakan Dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya IPK
			11. Penumbuhan dan peningkatan kesadaran keluarga dalam keterlibatan perencanaan kehidupan menuju keluarga berkualitas

Berdasarkan Tabel diatas dapat disimpulkan yaitu Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Tahun 2024 akan melaksanakan 3 Program, 5 Kegiatan dan 10 Sub Kegiatan urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Tabel 3.7

Identifikasi Permasalahan untuk Penentuan Program Prioritas Kabupaten Lima Puluh Kota

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			
2.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Penetapan program dan kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2022 mengacu kepada program dan kegiatan yang ada dalam Rancangan Awal Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2021-2026. Adapun pencantuman nomenklatur program dan kegiatan mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor. 050.5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan DPPKBPPPA berikut target kinerja dan indikasi anggaran Tahun 2024 secara lengkap dapat dibaca pada Tabel 4.1 di halaman berikut :

Sedangkan rekapitulasi rencana kegiatan dan pendanaan pada DPPKBPPA Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 4.2 di halaman berikut:

Tabel 4.2

Rencana Kebutuhan Pendanaan Berdasarkan Urusan, Jumlah Program dan Kegiatan DPPKBPPA Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024

No	Bidang Urusan	2024			2025			Ket
		Jumlah		Total Pagu (Rp)	Jumlah		Total Pagu Indikatif (Rp)	
		Program	Kegiatan		Program	Kegiatan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	5	11	1.140.540.400	5	11	2.800.000.000	
2	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	4	46	8.491.728.023	4	46	9.452.600.000	

PENUTUP

Rencana Kerja Perangkat Daerah ini disusun mengacu pada RPJMD tahun 2021-2026 dan Rencana Strategis (Renstra) tahun 2021-2026 masing-masing Perangkat Daerah.

Renja Perangkat Daerah memuat hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan Renja tahun lalu, permasalahan dan rumusan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pengguna anggaran dan pejabat pelaksana teknis kegiatan pada tahun yang akan datang.

Keberhasilan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sangat ditentukan oleh peran aktif seluruh jajaran pimpinan dan personil Perangkat Daerah. Untuk itu diperlukan sikap mental, tekad, semangat, dan kekuatan serta disiplin semua unsur Perangkat Daerah, dengan cara memberi dukungan penuh terhadap pelaksanaan program serta kegiatan sesuai dengan fungsi dan kemampuan masing-masing.

Keberhasilan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah juga sangat tergantung kepada keseriusan segenap unsur Perangkat Daerah dalam menyiapkan peraturan-peraturan yang akan menjadi dasar hukum bagi pelaksanaan program dan kegiatan serta dalam penataan pengelolaan program dan kegiatan tersebut selama satu tahun yang akan datang, baik dari segi tata kelola sumber daya manusia, tata kelola anggaran yang telah dialokasikan maupun tata kelola peralatan/perlengkapan.

Diharapkan pada awal tahun anggaran berjalan atau awal tahun 2024, seluruh kebutuhan pelaksanaan program/kegiatan tersebut sudah dapat diselesaikan.

Demikian Renja Perangkat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024 disusun, semoga mampu meningkatkan kinerja Perangkat Daerah dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun yang akan datang.

BUPATI LIMA PULUH KOTA

SAFARUDDIN DT. BANDARO RAJO